

## TAJUK RENCANA

### Heboh Al-Zaytun, Tuntaskan Segera

**KASUS** Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang di Indramayu Jawa Barat telah diambil alih pemerintah pusat. Pemprov Jabar hanya ditugasi untuk menjaga stabilitas dan kondisi sosial. Banyak pertanyaan muncul terkait permasalahan Pondok Al-Zaytun, mulai dari mengapa baru heboh sekarang, mengapa selama ini dibiarkan bahkan diberi akses luas ke pemerintahan, dan pihak-pihak mana yang terlibat dalam perkara ini?

Sejauh ini pemerintah belum mengumumkan bentuk pelanggaran hukum secara spesifik yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun. Pemerintah melalui Menkoplu-kam Mahfud MD baru mengumumkan setidaknya ada tiga persoalan yang melingkupi Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu, yakni potensi tindak pidana, pelanggaran administrasi dan kondisi sosial politik (KR 26/6).

Masyarakat heboh lantaran Ponpes yang didirikan tahun 1999 itu dinilai mengajarkan norma-norma yang menyimpang dari ajaran Islam. Mulai dari tata cara salat yang boleh berbaur antara laki-laki dan perempuan, halalkan zina asalkan membayar denda Rp 2 juta, dan banyak lagi penyimpangan lainnya. Penyimpangan seperti ini marak diberitakan di media sosial maupun media mainstream, hingga akhirnya pemerintah dan MUI bergerak melakukan investigasi.

Tak hanya itu, diduga dalam pesantren tersebut juga terjadi pelecehan seksual yang dilakukan pengurus Ponpes. Ketidakterbacaan itu sebenarnya sudah tercium ketika tim investigasi dari MUI ditolak kehadirannya di Ponpes Al-Zaytun. Hingga kemudian dilakukan langkah tabayun dengan mengundang Panji Gumilang untuk diperiksa.

Bila benar informasi yang beredar di masyarakat bahwa Ponpes Al Zaytun mengajarkan

hal-hal menyimpang dari ajaran Islam, bahkan melegalkan berzina maupun tindakan pelecehan seksual, maka ancaman hukumnya tidak main-main. Belum lagi sanksi administratif berupa pembekuan operasional pesantren. Untuk yang disebut terakhir ini tentu harus dipertimbangkan nasib para santri, jangan sampai mereka dirugikan.

Indikasi tindak pidana, baik berupa penodaan agama maupun pelecehan seksual, sudah diatur dalam hukum positif kita, baik itu KUHP, UU Perlindungan Anak hingga UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kini tinggal bagaimana aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal dalam ketentuan tersebut.

Demikian halnya terkait dugaan Ponpes terafiliasi dengan organisasi terlarang NII atau Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan Densus 88 Antiteror Mabes Polri sudah lama mencurigai sebagai jaringan teror NII KW9, namun belum ada tindakan. Tentu ini bukan main-main, karena merupakan persoalan serius bangsa yang harus segera dituntaskan. Slogan NKRI harga mati sebagaimana banyak didengungkan selama ini hendaknya jangan sekadar slogan belaka.

Aparat penegak hukum harus gerak cepat, karena ada kemungkinan mereka yang terlibat akan menghilangkan barang bukti. Tindakan polisional ini tak boleh ditunda, apalagi bila sekurangnya sudah ada dua alat bukti, dapat diteruskan dengan tindakan penahanan. Ini akan mengurangi bakal calon tersangka untuk berbantuan atau komunikasi dengan orang lain, khususnya jaringannya. Suplai dana ke pesantren juga harus dihentikan atau diblokir. Publik saat ini menunggu langkah cepat aparat penegak hukum. □-d

# Hukum dan Kualitas Akal Sehat

**KELEBIHAN** manusia atas makhluk-makhluk lain terletak pada karunia-Nya, berupa akal. Itulah, maka akal mesti dirawat dan digunakan sebaik-baiknya. *Cogito ergo sum*, kata Rene de Cartes. Artinya, aku berpikir, maka aku ada. Berpikir itu aktivitas ruhaniah, penggunaan akal. Dengan kata lain, bila manusia tak mau berpikir (tak menggunakan akal sehat), maka sia-sialah keberadaannya dalam kehidupan ini.

Alkisah. Suatu ketika, sesepuh kota menghadap Raja. Mengadukan perilaku masif warga kota. Gemar mabuk-mabuk. Sesepuh kewalahan menghadapinya. Mohon, kiranya Raja berkenan membuat hukum, melarang bermabuk-mabuk. Ternyata Raja melengos. Bersegeralah sesepuh kota ke luar istana. Di pintu gerbang, bertemu bendaharawan negara. Diceritakanlah apa yang terjadi.

Dinasihatkan oleh bendaharawan negara. Gunakan akal sehatmu. Intelegensiamu. Lain waktu, menghadaplah lagi. Bawakan hadiah kepada Raja. Cuan dan minuman memabukkan berkualitas unggul. Pada saat Raja mabuk, utarakan permohonanmu. Tanpa akal sehat, pasti permohonanmu dikabulkan.

Dalam arti fisik, mabuk adalah hilangnya kesadaran. Mabuk terjadi karena minuman keras, beralkohol, atau sejenisnya.

### 'Nggegirisi'

Berita terkini. Di salah satu kampus di Makassar ditemukan bunker. Di dalamnya ada semacam brankas penyimpanan sabu. Di sana juga terjadi transaksi peredarannya. Pengendali peredaran, ternyata salah satu lembaga pemasyarakatan (CNN Indonesia, 08/6) Berita lain. Ada industri rumahan sabu. Milik warga negara Iran, di sebuah apartemen di Cengkareng. Digerebek petugas Ditnarkoba Mabes Polri. Ditemukan sejumlah barang bukti sabu siap edar, bahan baku, serta sejumlah alat pembuatan sabu (Kompas, 24/6).

Kini, kejahatan narkoba, semakin marak, masif, *nggegirisi*. Produsen, pengedar, dan pengkonsumsi, terus bertambah. Semuanya sudah kehilangan akal sehat.

### Sudjito Atmoredjo

Perilakunya sesat, jahat, melanggar hukum.

Mabuk pada ranah sosial-kebangsaan, berarti rusaknya akal sehat pada warga negara maupun penyelenggara negara, sehingga berperilaku sesat, jahat, melanggar hukum. Penyebabnya, bukan sekadar narkoba atau sabu-sabu, melainkan berbagai barang haram, baik berupa benda, kekuasaan, popularitas. Banyak jabatan, haram hukumnya. Mengapa? Karena di-



amat paham filsufi. Tetapi gagal paham tentang filosofi. Disayangkan, bila mabuk harta-benda duniawi, berjangkit pada penegak konstitusi, penegak hukum, birokrat, dan lain-lainnya. Bisa dibayangkan, permohonan *judicial review* suatu undang-undang, dengan mudahnya ditolak. Bukan karena alasan-alasan akal sehat, melainkan sebab lain. Laporan ke aparat, akan didiamkan atau diproses, tergantung nafsu-nafsu kepentingan yang mengitarinya. Perzinahan, dimudahkan ketika diselipkan fulus cukup, tetapi dipersulit ketika diajukan dengan tangan kosong.

### Dikendalikan Nafsu

Femomena metamorfosa dari akal sehat menjadi akal bulus, terjadi karena penggunaan *judicial review* dikendalikan nafsu. Hasrat dan perilaku, cenderung sesat, jahat, melampaui batas kewajaran. Eksistensi dan fungsi kalbu (hati-nurani), sebagai instrumen pengendali kebenaran, justru ditinggalkan.

Layak diingat bahwa kalbu, berurusan dengan moralitas-religius-spiritual. Akal, terbatas untuk urusan intelektual, hal-hal bersifat fisik, inderawi, materi-duniawi saja. Ketika akal dominan dikendalikan nafsu, maka hukum pun menjadi permainan akal bulus. Harta, tahta, dan popuariltas, meskipun diperoleh secara legal-rasional, tetapi hakikatnya haram. Karena langka nilai-nilai moralitas-religius-spiritual.

Mari berintrospeksi. Cermati. Dalam bernegara hukum, seberapa banyak akal sehat telah berubah menjadi akal bulus. □-d

\*) Prof Dr Sudjito Atmoredjo, Guru Besar Ilmu Hukum UGM

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-copy identitas. Terimakasih.

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55233. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### 'Pembentukan' atau 'Pengembangan Karakter'?

JUDUL di atas berkaitan dengan rangkaian kata/kalimat : 'pembentukan karakter'. Kalimat ini sering muncul di media masa cetak bahkan juga pembelajaran di sekolah. Menurut pandangan saya, karakter manusia sudah terbentuk sejak dilahirkan bahkan sejak masih dalam kandungan (yang dalam Bahasa

Jawa *guwa garba*) Sang Ibu. Karena itu menurut saya secara semantik istilah yang benar bukan 'pembentukan karakter' tetapi yang tepat adalah 'pengembangan karakter'. Mungkin perlu ada pendapat para pakar bahasa. Matumuwun.

\*) FS Hartono, Purwasari 004/059 Sinduadi Sleman

### Bacapres/Bacaleg Jangan Lupakan Kekeringan

DI TENGAH kesibukan elite dan kader partai untuk berlaga di pesta demokrasi 2024, kabar beberapa wilayah mulai dilanda kekeringan mengemuka. Mungkin ini memang merupakan kabar rutin tahunan. Artinya setiap tahun wilayah tersebut memang selalu dilanda kekeringan.

Semoga sosialisasi bacaleg atau di tengah kesibukan elite menggalang koalisi, kerja sama dan menimang calon pendamping masalah kekeringan tidak diabaikan. Namun berharap bukan dengan memanfaatkan

momentum ini kepentingan sesaat mereka.

Ada harapan besar agar yang hendak berkompetisi dalam pesta demokrasi 2024 baik dalam pemilihan legislative maupun pemilihan presiden juga memikirkan solusi kekeringan ini jangka panjang. Artinya, tidak sekadar membagikan atau dropping air ke daerah kekeringan. Tetapi memberikan solusi yang bisa diambil agar daerah tersebut tidak menjadi daerah langganan kekeringan.

\*) Titik SP, Wedi Klaten

**MENJELANG** pemilu dan Pileg 2024 berita politik semakin marak menghiasi media massa nasional kita. Perbincangan pun berkisar seputar bacapres/bawacapres sampai dengan hasil pertempuran politik anta parpol untuk mematangkan posisi koalisi di antara mereka. Sampai saat ini telah tercatat 3 (tiga) koalisi besar yaitu koalisi PDIP, Koalisi Gerindra dan Koalisi Nasdem. Masing masing telah menentukan bacapres yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subiyanto dan Anies Rasyid Baswedan. Sedang bacawapres belum dikomunikasikan ke publik karena tengah digodog dan ditimbang-timbang. Posisi bacawapres menjadi semakin penting dan strategis karena akan mengangkat elektabilitas parpol.

Isu-isu bakal siapa yang akan menjadi bacawapres menjadi bagian penting dari diskursus publik. Terkait dengan bacawapres, pertemuan antara Puan Maharani (PDIP) dan AHY (Demokrat) menjadi menarik perhatian, karena AHY masuk nominasi bacawapres Ganjar Pranowo. Dan masing masing pihak pun hampir selama 20 tahun mengalami kebuntuan komunikasi politik. Sehingga pertemuan tersebut menjadi sorotan publik atau 'top issues'. Publik pun membuat spekulasi terhadap apa yang diperbincangkan kedua petinggi parpol tersebut.

### Posisi Media

Bagaimana posisi media? Media berusaha mengungkap latar belakang pertemuan tersebut. Tentu media akan berupaya menggali informasi dibalik pertemuan tersebut. Media menilai bisa saja pertemuan tersebut akan mengubah peta koalisi antarpantai. Dugaan pilpres pun bisa berjalan satu putaran saja. Bagi media, pertemuan Puan - AHY dimaknai sebagai wujud rekonsiliasi.

### Tommy Suprpto

McQuail (1987:55) mengungkap bahwa media berperan menjelaskan dan memberi makna terhadap suatu peristiwa. Terkait rekonsiliasi suasana pileg dan pilpres akan menyejukan, aman, lancar dan damai. Media berupaya membongkai peristiwa itu sebagai 'simbol' rekonsiliasi dengan pengharapan bisa memberikan dampak positif bagi pemilih, Terkait dengan peristiwa tersebut, media akan berusaha mencari narasumber yang kompeten dan terpercaya untuk mengungkap apa di balik pertemuan Puan dan AHY tersebut. Sehingga diharapkan publik akan memiliki banyak referensi dalam menanggapi peristiwa tersebut. Karena itulah seperti dikatakan McQuail (1987: 54) media selalu memberikan bahan dari beberapa narasumber untuk membentuk persepsi kita tentang suatu peristiwa.

### Proses Journalistik

Media juga melengkapi pengetahuan kita tentang isu itu, dengan menyampaikan informasi melalui proses jurnalistik politik yakni telah terjadi suatu peristiwa pertemuan Puan dan AHY (*What*), yang dilakukan petinggi parpol dari PDIP dan Demokrat (*Who*) untuk membangun komunikasi politik di antara kedua belah pihak (*Why*). Kegiatan diselenggarakan pada suatu tempat netral (*Where*) dikemas melalui kegiatan olahraga lari pagi bersama (*When*). Selanjutnya pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan bahwa PDIP dan Demokrat berkomitmen menjaga politik pra dan pascapemilu legislatif dan pemilu presiden (pilpres) berlangsung kondusif, dan damai. Serta

silaturahmi harus terus dilaksanakan (*How*)

Media dalam memilih dan menetapkan isu-isu utama adalah dengan memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian publik. Selanjutnya, bagaimana media menempatkan posisi isu tersebut dan menentukan frekuensi pemunculan isu, posisi isu dalam media, serta cara penyajian bahan, merupakan kebijakan (*policy*) dari media yang bersangkutan atau yang lebih dikenal sebagai politik jurnalistik. Yakni, media menarik perhatian terhadap isu yang dianggap penting menurut khalayak. Efek lanjutan adalah berupa pengetahuan, persepsi khalayak, serta tindakan khalayak (dalam pemilu misalnya memilih kontestan, mengapresiasi terhadap tokoh politik, menyetujui gagasan, dan lain lain). □-d

\*) Tommy Suprpto, pemerhati media dan komunikasi, Dosen LB Prodi MIK STMM-MMTC Yogyakarta.

## Pojok KR

Pemerintah pusat tangani permasalahan Al-Zaytun.

-- Meskipun agak terlambat.

\*\*\*

Investor bakal caplok lahan pertanian di Bantul.

-- Penduduk lokal hanya jadi penonton.

\*\*\*

Anggota geng sekolah ditangkap petugas kamling.

-- Jangan dihakimi, serahkan ke polisi.

*Berabe*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito Mpd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk23@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)